BAB III
TINJAUAN UMUM PT POS INDONESIA (PERSERO)

3.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

Kantor pos pertama yang didirikan di Jakarta tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jendral G.W. Van Imhoff.

Pada tahun 1922-1923 Kantor Pusat PTT yang mula-mula berkedudukan di Welterveden (Gambir) mulai dipindahkan ke gedung "*Burgerlijke Openbare Werken*" *BOW* (Dinas Pekerjaan Umum) di Bandung

Selama masa pendudukan Jepang, Jawatan PTT terpecah-pecah mengikuti struktur organisasi Jepang yang terdiri dari PTT Sumatera, PTT Jawa dan PTT Sulawesi. Tanggal 14 Agustus 1945 Pemerintah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Namun penyerahan Jawatan PTT dari tangan Jepang ke tangan Pemerintah Republik Indonesia tidak sejalan sebagaimana mestinya. Pada tanggal 27 September 1945 sekelompok pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda PTT (AMPTT) telah merebut kekuasaan atas Jawatan PTT dari tangan Jepang. Sejak saat itu tanggal 27 September dinyatakan sebagai HARI BAKTI POSTEL. Sebagai Kepala Jawatan PTT Republik Indonesia yang pertama diangkatlah Mas Soeharto didampingi R. Dijar yang diangkat sebagai wakilnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 240 tahun 1961 status Jawatan PTT diubah menjadi PN Pos dan Telekomunikasi. Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung dan mempunyai cabang-cabang di seluruh Indonesia menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral PN Pos dan Telekomunikasi.

Mengingat perkembangan PN Postel demikian pesatnya, pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi dua Perusahaan Negara PN Pos dan Giro berdasarkan PP Nomor 29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi berdasarkan PP Nomor 30 tahun 1965. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969, status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditetapkan menjadi Perjan, Perum dan Persero. PN Pos dan Giro diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro berdasarkan PP Nomor 9 tahun 1978.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 ditetapkan tata cara pengawasan dan pembinaan Perjan, Persero dan Perum. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini PP Nomor 9 tahun 1978 yang mengatur tentang Pos dan Giro diganti menjadi PP Nomor 24 tahun 1984.

Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Pos dan Giro termaktub dalam Bab III Pasal 5 PP Nomor 24 tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro yang berbunyi :

1. Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

2. Maksud perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
3. Tujuan perusahaan adalah membangun, mengembangkan dan mengusahakan pelayanan Pos dan Giro dalam arti seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksanannya pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 bentuk Perusahaan Umum Pos dan Giro diubah menjadi Perusahasn Perseroan (Persero).

Maksud dan Tujuan PT Pos Indonesia adalah :

a. Menyelenggarakan Usaha jasa pos dan giro
b. Menyelenggarakan Usaha-usaha lain yang menunjang penyelenggaraan usaha jasa pos dan giro sesuai dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku.

PT Pos Indonesia resmi berdiri tanggal 20 Juni 1995. Maka setiap tanggal 20 Juni dijadikan Hari Ulang Tahun PT Pos Indonesia.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM. 17/OT.002/MPPT-84 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Pos Indonesia menyebutkan : PT Pos Indonesia mempunyai tugas pokok membangun , mengusahakan dan megembangkan pelayanan dalam lalu lintas berita dan informasi

tertulis, barang dan uang untuk mempertinggi kelancaran hubungan-hubungan masyarakat guna manunjang pembangunan negara.

Dalam keputusan itu juga diatur mengenai organisasi perusahaan yang disusun dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :

a. Tingkat Pusat

b. Tingkat Daerah

c. Tingkat Unit Pelaksanaan teknis

ad.a. Organisasi perusahaan ditingkat pusat terdiri dari

4 (empat) Direktorat : - Direktorat Operasi
- Dirertorat SDM dan Sarana
- Direktorat Keuangan
- Direktorat Niaga

3 (tiga) Pusat : - Pusat Perencanaan Pos
- Pusat Pendidikan dan Latihan
- Pusat Penelitian dan Perlengkapan Pos

1 (satu) Inspektorat

9 (sembilan) Sub Direktorat

46 (empat puluh enam) Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu

ad.b. Organisasi Perusahaan Tingkat Daerah tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah Usaha Pos.

ad.c. Tingkat unit pelaksanaan teknik terdiri dari :

- Kantor-kantor Pos dan Giro

- Kantor-kantor Sentral Giro
- Kantor-kantor Pos dan Giro Tambahan
- Kantor-kantor Pos dan Giro Pembantu

Pada organisasi tingkat pusat, termasuk kedalamnya adalah Direktorat Perlengkapan dan Bangunan dipimpin oleh Direktur Perlengkapan dan Bangunan mempunyai tugas mengelola perlengkapan dan bangunan perusahaan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan perlengkapan dan bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Perlengkapan dan Bangunan mempunyai fungsi :

- Perencanaan dan pembinaan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran benda pos dan materai, pelayanan filateli serta perencanaan penghapusan benda pos dan materai.
- Perencanaan dan pembinaan pengurusan peralatan pos, bangunan, dan kendaraan.

Direktorat Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan perusahaan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna penggunaan uang perusahaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Direktorat Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyiapan, pembinaan rencana anggaran, pembinaan dan penyelenggaraan pembukuan perusahaan, pembuatan laporan tahunan keuangan perusahaan, serta pengelolaan dana perusahaan.

- Pembinaan dan penyelenggaraan perbendaharaan, verifikasi kas kantor pos/sentral giro dan verifikasi terhadap keabsahan semua pengeluaran perusahaan serta pengendalian likuiditas keuangan perusahaan.

Pada organisasi tingkat daerah, pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi No. 80/peg/Dirut Pos/86 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dapos, yang sekarang ini Dapos tersebut telah diganti menjadi Wilpos (Wilayah Usaha Pos) menurut keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No. 209/Dirut/1995 Tgl. 7 November 1995, dengan 11 Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Kawilpos, yaitu:

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA KAWILPOS

NO	WILPOS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	I	Medan	Propinsi DI Aceh dan Propinsi Sumatra Utara
2.	II	Padang	Propinsi Sumatra Utara dan Propinsi Riau
3.	III	Palembang	Propinsi Sumatra Selatan, Propinsi Jambi, Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkulu
4	IV	Jakarta	Propinsi DKI Jakarta, Dati II (Kab/ Kodya) Bogor Dati II (Kab/ Kodya) Tanggerang, dan Dati II Kodya Bekasi
5	V	Bandung	Propinsi Jawa Barat tidak termasuk Dati II (Kab/ Kodya) Bogor Dati II (Kab/Kodya) Tanggerang, dan Dati II Kodya Bekasi
6	VI	Semarang	Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DI Yogyakarta
7	VII	Surabaya	Propinsi Jawa TImur
8	VIII	Denpasar	Propinsi Bali, Propinsi NTB, Propinsi NTT, dan Propinsi Timor Timur.
9	IX	Banjarbaru	Propinsi Kalimantan Selatan, Tengah Propinsi Kalimantan Timur, dan Propinsi Kalimantan Barat
10	X	Ujung Pandang	Propinsi Sulawesi Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara Propinsi Sulawesi Utara Propinsi Sulawesi Tengah
11	XI	Jaya Pura	Propinsi Maluku Propinsi Irian Jaya

3.3 Produksi PT Pos Indonesia (Persero)

Dalam menjalankan aktivitasnya PT Pos Indonesia melakukan beberapa kegiatan produksi yang terbagi atas :

1. Jenis Surat Pos :
   a. Dalam Negeri :
      - Biasa
      - Tercatat
      - Kilat Biasa
      - Kilat Khusus
      - Kilat Tercatat
   b. Luar Negeri (bukan Pos udara)
      - Biasa
      - Tercatat
   c. Luar Negeri (Pos Udara)
      - Biasa
      - Tercatat
2. Lalu lintas paket pos dikirim :
   a. Dalam Negeri
   b. Luar Negeri
3. Lalu Lintas wesel pos dikirim :
   a. Dalam Negeri
   b. Luar Negeri
4. Dinas Giro dan Cekpos
5. Tabanas
6. Dinas pemotongan uang pensiun ex kredir BRI, BTPN/BBAI
7. Penjualan benda materai

Sedangkan untuk alat-alat produksi yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia adalah :

1. Kantor Pos dan Giro :
   a. Kantor pos (Besar/I)
   b. Kantor Pos Tambahan
   c. Kantor Pos Pembantu
   d. Sentral Giro
   e. Loket Extention
2. Unit Pelayanan Pos Bergerak :
   a. Pos kelilling kota
   b. Pos keliling desa
3. Unit Pelayanan Pos :
   a. Rumah pos
   b. Agen pos
   c. Agen pos desa
4. Fasilitas Pos :
   a. Dipo benda pos dan materai
   b. Kotak pos
   c. Tromol pos
   d. Bis surat
5. Fasilitas Pos lainnya :
   a. Perangko berlangganan
      - Barang cetakan
      - Surat kabar
   b. Bulk pos
   c. Bulk paket pos
   d. Reklame terpimpin
6. Kendaraan bermotor (operasional) :
   a. Roda dua
   b. Roda empat

3.4 Struktur Organisasi dan Job Description

Pemimpin tertinggi di PT Pos Indonesia (Persero) ada pada Direktur Utama. Adapun pengertian dari organisasi itu sendiri adalah hubungan struktural yang mengikat atau menyatukan perusahaan dan kerangka dasar tempat individu-individu berusaha dikoordinasi.

Koordinasi merupakan fungsi untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, demi tercapainya tujuan organisasi perusahaan.

Untuk menjalankan operasi usahanya terdapat bagian-bagian yang mengkoordinasinya.

1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari seksi-seksi sebagai berikut :
   a. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana
   b. Seksi Anggaran dan Keuangan
   c. Seksi Akuntansi
   d. Seksi Pusat Perencanaan Data

Adapun bagian yang teerlibat dalam masalah gaji atau penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Sarana, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
   Melaksanakan kegiatan perencanaan pengurusan sumber daya manusia, tata usaha kesekretariatan dan pengurusan rumah tangga serta keamanan lingkungan kerja.
   Fungsi seksi Sumber Daya Manusia dan sarana adalah :
   a. Perencanaan dan pengembangan pegawai.
   b. Pelaksanaan tata usaha pengajian dan pengupahan SDM.
   c. Perencanaan kebutuhan sarana kerja.
2. Seksi Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pendapatan cabang serta membantu pelaksanaannya.

Fungsi seksi anggaran dan keuangan adalah :

a. Penyiapan rencana kerja dan anggarannya
b. Pemantauan anggaran belanja dan pendapatan
c. Pengolahan data dan daur kas
d. Pengasuransian harta kekayaan perusahaan
e. Pencatatan pajak perusahaan

3. Seksi akuntansi mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi, aktiva tetap, pekerjaan dalam pelaksanaan serta persediaan barang.

Fungsi seksi akuntansi diantaranya :

a. Pelaksanaan pencatatan semua transaksi perusahaan menyangkut investasi dan operasi.
b. Pelaksanaan pembuatan laporan pembukuan tahunan dan neraca.

4. Seksi pusat perencanaan data mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Melakukan pengolahan data pembinaan aplikasi program komputer.